

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 5, June 2025, P. 560-568

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16098741>

Pengaruh Variabel-variabel Sektor Pariwisata terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2024

Muhammad Fakhri Habibi^{1*}, Agus Purwoto², Baran Hidayat Azzahra³, Dhea Patikasari Napitupulu⁴, Yohana Herdianly Br Nainggolan⁵

^{1,2,3,4,5}Politeknik Statistika STIS

*Email korespondensi: 112313236@stis.ac.id

Abstrak

Pengangguran merupakan isu serius di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat yang mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi secara nasional sebesar 6,75% pada tahun 2024. Ironisnya, Jawa Barat memiliki potensi sektor pariwisata yang besar. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh sektor pariwisata terhadap TPT di Jawa Barat. Variabel independen meliputi jumlah kunjungan wisatawan, jumlah restoran/kafe, jumlah hotel, dan jumlah potensi objek daya tarik wisata. Data yang digunakan berupa data cross-section dari 27 kabupaten/kota dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa secara simultan, seluruh variabel pariwisata berpengaruh signifikan terhadap TPT. Secara parsial, jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPT, sedangkan jumlah ODTW berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, jumlah restoran/kafe dan hotel tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah wisatawan belum tentu menurunkan pengangguran, karena adanya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan jenis lapangan kerja yang tersedia. Sebaliknya, pengembangan objek wisata berbasis komunitas berpotensi menurunkan TPT. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi pariwisata yang inklusif dan berbasis pemberdayaan tenaga kerja lokal.

Kata kunci: Pariwisata, Tingkat Pengangguran Terbuka, Analisis Regresi Linear Berganda.

Abstract

Unemployment is a critical issue in Indonesia, especially in West Java Province, which recorded the highest Open Unemployment Rate (OUR) nationally at 6.75% in 2024. Despite its high tourism potential, unemployment remains prevalent. This study examines the impact of the tourism sector on the OUR in West Java using cross-sectional data from 27 regencies/cities. Independent variables include the number of tourist visits, restaurants/café, hotels, and tourist attractions. A multiple linear regression analysis was employed. The results show that tourism variables collectively have a significant effect on OUR. Individually, tourist visits have a positive and significant effect, while tourist attractions negatively and significantly affect OUR. However, the number of restaurants/café and hotels show no significant effect. These findings indicate that increasing tourist arrivals alone is insufficient to reduce unemployment due to a skills mismatch in the labor market. Community-based tourism development may offer a more effective approach. Policymakers should prioritize inclusive tourism strategies that align with local workforce capabilities.

Keyword: Tourism, Open Unemployment Rate, Multiple Linear Regression Analysis.

Article Info

Received date: 25 June 2025

Revised date: 27 June 2025

Accepted date: 13 July 2025

PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan masalah setiap negara, bahkan negara maju terlebih lagi di negara yang berkembang seperti Indonesia (Anwar, 2023). Menurut BPS, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja atau sudah mempunyai usaha tapi belum memulainya. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengatasi pengangguran, tetapi faktanya persoalan pengangguran belum terselesaikan (Lusiana *et al.*, 2024). Di tingkat provinsi, Jawa Barat menjadi provinsi dengan TPT tertinggi di Indonesia pada Agustus 2024, yaitu sebesar 6,75% (BPS, 2024). Tingginya TPT Jawa Barat menegaskan bahwa Jawa Barat memiliki

TPT yang lebih besar dibandingkan TPT nasional dalam 5 tahun terakhir. Kondisi yang dialami oleh Jawa Barat menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Jawa Barat tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya (Wati *et al.*, 2024). Ketidakmampuan untuk menekan jumlah pengangguran akan menimbulkan dampak dalam bidang lainnya, seperti kemiskinan, kriminalitas, dan juga ketidakstabilan sosial politik (Anwar, 2023).

Di sisi lain, Jawa barat dikenal sebagai provinsi dengan potensi pariwisata yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari data BPS (2024) yang menunjukkan bahwa ada 64.517.298 kunjungan wisatawan yang mengunjungi objek wisata di Provinsi Jawa Barat yang sangat beragam, baik alam, budaya, ataupun buatan. Potensi besar ini seharusnya mampu mengurangi pengangguran melalui efek ekonomi yang ditimbulkan. Hal ini dijelaskan melalui penelitian Yasa *et al.* (2025) yang menjelaskan bahwa perkembangan sektor pariwisata akan memberikan dampak terhadap perkembangan sektor lainnya. Kebutuhan konsumsi dan akomodasi oleh wisatawan akan membuka peluang untuk membuka usaha yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja. Namun, realitas yang terjadi di Jawa Barat menunjukkan bahwa potensi sektor pariwisata yang begitu besar tidak selalu diiringi dengan penurunan TPT.

Jumlah wisatawan yang begitu besar di Jawa Barat diiringi dengan tingginya TPT juga menunjukkan bahwa faktor jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata semata belum cukup untuk menjelaskan hubungan sektor pariwisata terhadap TPT dan diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa perlu analisis terhadap faktor lainnya, seperti jumlah hotel berbintang dan non-bintang, jumlah restoran/rumah makan/kafe, dan potensi objek daya tarik wisata. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis gambaran umum TPT dan variabel sektor pariwisata yang diduga mempengaruhinya. Serta penelitian ini secara khusus juga ingin mengetahui apakah sektor pariwisata yang direpresentasikan oleh jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata, jumlah potensi objek daya tarik wisata, jumlah restoran/rumah makan/kafe serta jumlah hotel berbintang dan non bintang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2024.

Temuan ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pemerintah, terutama pemerintah daerah dalam merancang kebijakan. Dengan memahami ada tidaknya pengaruh dari beberapa variabel sektor pariwisata terhadap TPT, diharapkan pemerintah daerah dapat merancang program atau kebijakan yang strategis dan efektif untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka secara optimal

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari portal data resmi milik Badan Pusat Statistik serta portal *open data* Jawa Barat yang bersifat publik. Seluruh data dikumpulkan dalam format lintas daerah (*cross-section*) untuk 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Dalam melakukan analisis data, digunakan dua jenis analisis, yaitu analisis deskriptif untuk memberikan gambaran umum dan analisis inferensia untuk menguji hubungan antar variabel dalam penelitian ini.

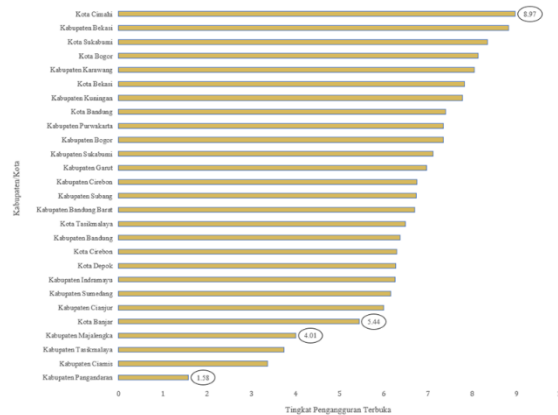
Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi variabel-variabel seperti TPT, jumlah wisatawan, restoran, hotel, dan potensi objek wisata di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Data disajikan dalam bentuk grafik untuk menunjukkan variasi dan persebaran antar wilayah. Pengolahan dan visualisasi dilakukan menggunakan Microsoft Excel 2021.

Analisis inferensia yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan metode Ordinary Least Squares (OLS) untuk menganalisis pengaruh sektor pariwisata terhadap TPT di Jawa Barat. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas (Shapiro-Wilk), heteroskedastisitas (Uji Glejser), dan multikolinieritas (nilai tolerance dan VIF). Pengujian model dilakukan secara simultan dengan uji F dan secara parsial dengan uji t terhadap empat variabel independen. Galat yang digunakan pada penelitian ini sebesar 5%. Setelah pengujian dan verifikasi model, interpretasi dilakukan untuk melihat hubungan dan arah pengaruh masing-masing variabel. Seluruh proses pengolahan menggunakan *software* SPSS versi 27.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum TPT di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2024

Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan serius dalam mengatasi tingginya pengangguran terbuka (TPT), yang mencapai angka tertinggi nasional sebesar 6,75% pada Agustus 2024. Meskipun demikian, angka pengangguran ini tidak merata dan sangat bervariasi antar kabupaten/kota di Jawa Barat.

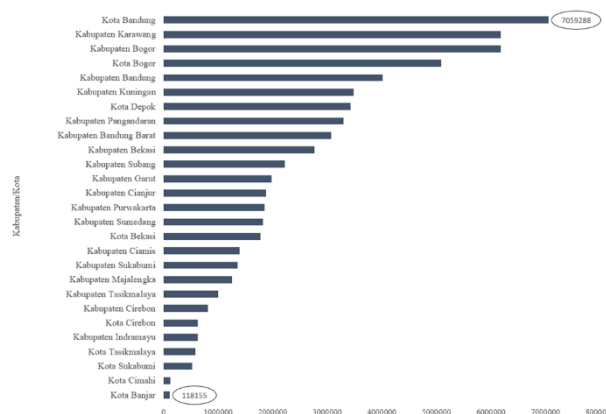


Gambar 1. TPT menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada 2024.

Berdasarkan gambar, Kota Cimahi mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi di Jawa Barat sebesar 8,97%, diikuti oleh Kota Sukabumi (8,34%) dan Kota Bogor (8,13%), sementara Kabupaten Pangandaran memiliki TPT terendah sebesar 1,58%. Perbedaan signifikan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penyerapan tenaga kerja, serta belum optimalnya strategi penanganan pengangguran di tingkat kabupaten/kota, terutama karena hanya empat daerah yang mencatat TPT di bawah angka nasional (4,91%).

Gambaran Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obek Wisata di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2024

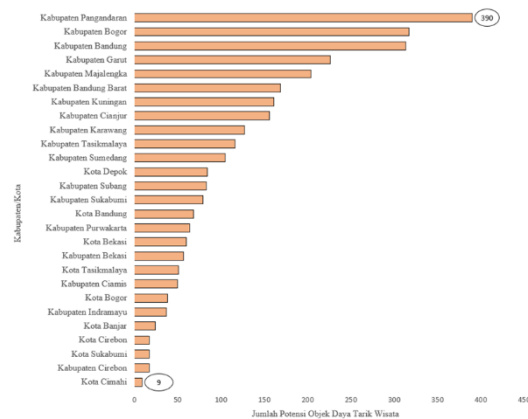
Jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata di Provinsi Jawa Barat mencapai 64.517.298 orang pada tahun 2024, meningkat dari 59.332.100 orang pada tahun sebelumnya, dengan dominasi wisatawan nusantara. Namun, berdasarkan gambar, persebaran kunjungan wisatawan antar kabupaten/kota di Jawa Barat masih belum merata.



Gambar 2. Tingkat kunjungan wisatawan ke objek wisata menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada 2024.

Berdasarkan grafik berikut, kota bandung menjadi wilayah yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan nusantara atau wisatawan mancanegara. Lalu disusul oleh Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor. Sebaliknya beberapa daerah seperti Kota Banjar, lalu Kota Cimahi, dan Kota Sukabumi mencatatkan jumlah kunjungan yang jauh lebih rendah.

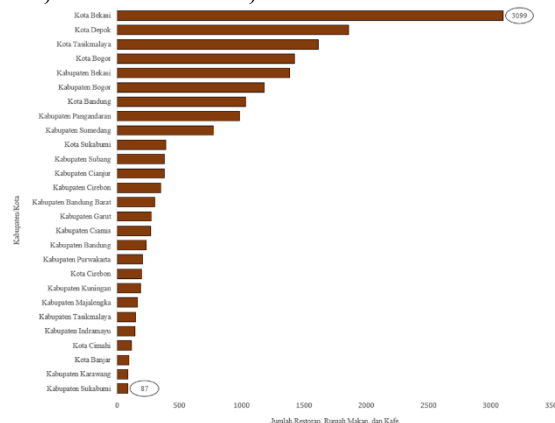
Gambaran Jumlah Potensi Objek Daya Tarik Wisata



Gambar 3. Jumlah potensi objek daya tarik wisata menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada 2024.

Berdasarkan grafik, jumlah potensi objek daya tarik wisata (ODTW) di Provinsi Jawa Barat belum merata antar kabupaten/kota, dengan Kabupaten Pangandaran memiliki potensi terbanyak (390 ODTW), diikuti Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung. Sebaliknya, Kota Cimahi, Kabupaten Cirebon, Kota Sukabumi, dan Kota Cirebon memiliki jumlah potensi ODTW paling sedikit. Selain itu, wilayah kabupaten secara umum memiliki lebih banyak potensi wisata dibandingkan kota karena luas wilayah yang lebih besar, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, serta kondisi geografis yang lebih beragam.

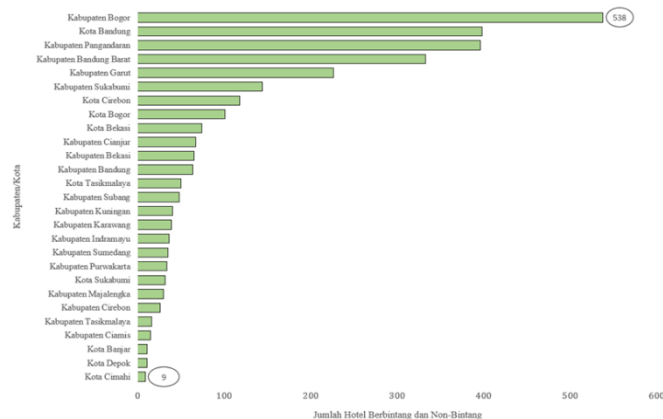
Gambaran Jumlah Restoran, Rumah Makan, dan Kafe



Gambar 4. Jumlah restoran, rumah makan, dan kafe menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada 2024.

Berdasarkan gambar 8, terdapat ketimpangan signifikan dalam jumlah restoran, rumah makan, dan kafe antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Kota Bekasi mencatat jumlah tertinggi dengan 3.099 unit, diikuti Kota Depok (1.858 unit) dan Kota Tasikmalaya (1.616 unit), yang seluruhnya merupakan wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi. Sebaliknya, wilayah seperti Kabupaten Sukabumi (87 unit), Kabupaten Karawang (88 unit), dan Kota Banjar (94 unit) memiliki jumlah paling sedikit, menggambarkan disparitas yang besar dalam pengembangan sektor kuliner di Jawa Barat.

Gambaran Jumlah Hotel (Hotel Berbintang dan Non Berbintang)



Gambar 5. Jumlah hotel berbintang dan non-bintang menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada 2024.

Berdasarkan grafik, jumlah hotel di Provinsi Jawa Barat tahun 2024 menunjukkan ketimpangan antar wilayah, dengan jumlah terbanyak terdapat di Kabupaten Bogor (538 unit), diikuti Kota Bandung (398 unit) dan Kabupaten Pangandaran (396 unit), sejalan dengan potensi wisata dan ekonomi di wilayah tersebut. Sebaliknya, wilayah seperti Kota Cimahi hanya memiliki 9 unit hotel, diikuti Kota Depok dan Kota Banjar masing-masing 11 unit, kondisi yang mencerminkan karakter wilayah tersebut sebagai daerah padat penduduk dengan dominasi fungsi permukiman atau administratif.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil uji normalitas residual menggunakan uji *Shapiro-Wilk*.

	Statistic	df	Sig.
<i>Unstandarized Residual</i>	0,969	27	0,582

Pengujian normalitas residual yang dilakukan dalam penelitian ini menghasilkan nilai statistik Shapiro-Wilk sebesar 0,969 dengan nilai *p-value* sebesar 0,582. Nilai *p-value* yang lebih besar daripada tingkat signifikansi 5% menunjukkan bahwa, pada taraf signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal atau gagal menolak hipotesis nol (residual memiliki distribusi normal).

Uji Homoskedastisitas

Tabel 2. Hasil uji homoskedastisitas (Uji Glejser).

Variable	t	Sig.
<i>Constant</i>	2,959	0,007
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata	-0,751	0,460
Jumlah Restoran, Rumah Makan, dan Kafe	-0,277	0,784
Jumlah Hotel Berbintang dan Non-bintang	0,561	0,580
Jumlah Potensi Objek Daya Wisata (ODTW)	0,941	0,360

Uji homoskedastisitas dilakukan menggunakan metode Glejser, dengan cara meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai signifikansi masing-masing variabel sebagai berikut: Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata sebesar 0,460, Jumlah Potensi Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) sebesar 0,370, Jumlah Restoran, Rumah Makan, dan Kafe sebesar 0,784, serta Jumlah Hotel Berbintang dan Non-Bintang sebesar 0,580. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model. Dengan demikian, asumsi homoskedastisitas terpenuhi.

Uji Non-Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil uji multikolineritas (VIF dan Tolerance).

Variable	Tolerance	VIF
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata	0,618	1,167
Jumlah Restoran, Rumah Makan, dan Kafe	0,906	1,104
Jumlah Hotel Berbintang dan Non-bintang	0,515	1,942

Jumlah Potensi Objek Daya Wisata (ODTW) 0,618 1,617

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari masing-masing variabel independen. Berdasarkan hasil output, seluruh variabel memiliki nilai VIF < 10, yaitu: Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata sebesar 1,617, Jumlah Restoran, Rumah Makan, dan Kafe sebesar 1,104, Jumlah Hotel Berbintang dan Non-Bintang sebesar 1,942, serta Jumlah Potensi Objek Daya Tarik Wisata sebesar 1,617. Karena seluruh nilai VIF berada di bawah ambang batas 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi. Dengan demikian, model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil uji autokorelasi (Uji Durbin-Watson).

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	0,597	0,356	0,239	2,052

Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan nilai Durbin-Watson. Berdasarkan output, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,052. Dengan jumlah sampel sebanyak 27 ($N = 27$) dan jumlah variabel independen sebanyak 4 ($k = 4$), diperoleh batas bawah (dL) sebesar 1,10 dan batas atas (dU) sebesar 1,65. Karena nilai 2,052 berada di antara dU dan $4 - dU$ ($1,65 < 2,052 < 2,35$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi dalam model regresi. Dengan demikian, model regresi yang memuat variabel Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata, Jumlah Potensi Objek Daya Tarik Wisata, Jumlah Restoran, Rumah Makan, dan Kafe, serta Jumlah Hotel Berbintang dan Non-Bintang telah memenuhi asumsi bebas autokorelasi dan layak digunakan dalam analisis selanjutnya.

Uji Keberartian Model

Uji Simultan

Tabel 5. Hasil uji simultan (Uji F).

	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	26,948	4	6,737	3,039	0,039
Residual	48,769	22	2,217		
Total	75,716	26			

Berdasarkan hasil *output*, diperoleh nilai F-statistic sebesar 3,039 dengan *p-value* 0,039. Karena *p-value* ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, maka hipotesis nol ditolak. Dengan demikian, pada tingkat signifikansi 0,05 dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Jumlah Kunjungan Wisata ke Objek Wisata, Jumlah Restoran, Rumah Makan, dan Kafe, dan Jumlah Hotel Berbintang dan Non-Bintang, Jumlah Potensi Objek Daya Tarik Wisata berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.

Uji Parsial

Tabel 6. Hasil uji parsial (Uji t).

Variable	t	Sig.
<i>Constant</i>	12,128	< 0,001
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata	2,112	0,046
Jumlah Restoran, Rumah Makan, dan Kafe	0,228	0,822
Jumlah Hotel Berbintang dan Non-bintang	-0,023	0,982
Jumlah Potensi Objek Daya Wisata (ODTW)	-2,821	0,010

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh bahwa variabel jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata (*p-value* = 0,046) dan jumlah potensi objek daya tarik wisata (*p-value* = 0,010) memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan secara parsial terhadap TPT di Jawa Provinsi Barat. Sebaliknya, variabel jumlah restoran, rumah makan, dan kafe (*p-value* = 0,822) dan jumlah hotel berbintang dan non-bintang (*p-value* = 0,982) memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap TPT.

Pengaruh Variabel Jumlah Wisatawan terhadap TPT

Variabel jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata berpengaruh signifikan terhadap TPT di Jawa Barat dengan koefisien positif sebesar $4.068e^{-7}$ dan nilai signifikansi 0,046. Hasil ini bertentangan dengan teori umum yang menyatakan bahwa peningkatan wisatawan seharusnya menurunkan TPT melalui penciptaan lapangan kerja baru di sektor jasa. Kondisi selaras dengan fakta empiris bahwa kunjungan wisatawan di Jawa Barat terkonsentrasi di wilayah perkotaan seperti Kota Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bandung Barat, yang justru mencatatkan angka TPT tinggi. Hal ini disebabkan oleh segmentasi pasar tenaga kerja, di mana sektor pariwisata di kota besar umumnya didominasi usaha formal padat modal yang memerlukan tenaga kerja profesional serta bersifat musiman dan informal, sehingga tidak secara efektif menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar.

Mismatch antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan sektor pariwisata turut memperparah situasi tersebut. Mayoritas pengangguran di Jawa Barat adalah lulusan pendidikan menengah ke bawah, sedangkan sektor wisata perkotaan membutuhkan keterampilan komunikasi, pelayanan prima, dan penguasaan bahasa asing yang jarang dimiliki oleh tenaga kerja lokal. Ketidaksiuaian ini menyebabkan peningkatan kunjungan wisatawan tidak secara otomatis menurunkan angka pengangguran, karena penciptaan lapangan kerja tidak sejalan dengan karakteristik tenaga kerja yang tersedia.

Pengaruh Variabel Jumlah Potensi Objek Daya Tarik Wisata terhadap TPT

Variabel jumlah potensi objek daya tarik wisata memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan TPT di Jawa Barat dengan nilai koefisien negatif sebesar -0,010 dan signifikansi sebesar 0,010. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap penambahan satu objek wisata diperkirakan mampu menurunkan TPT sebesar 1%. Temuan ini sejalan dengan teori *Local Economic Development* yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya lokal, seperti objek wisata, mampu meningkatkan aktivitas ekonomi serta menciptakan lapangan kerja langsung bagi masyarakat setempat.

Pengelolaan objek wisata berbasis komunitas melalui BUMDes dan Pokdarwis, terutama di wilayah semi-perdesaan seperti Pangandaran, Kuningan, dan Ciamis, terbukti efektif mengurangi pengangguran karena melibatkan langsung masyarakat lokal dalam sektor wisata. Secara spasial, pengembangan objek wisata juga mendorong desentralisasi ekonomi ke wilayah yang sebelumnya minim industri, seperti kawasan selatan Garut, utara Tasikmalaya, dan perbukitan Sukabumi. Kondisi ini konsisten dengan pendekatan *bottom-up development*, di mana pembangunan ekonomi berbasis komunitas lokal mampu menghasilkan dampak nyata dalam mengurangi angka pengangguran secara lebih merata.

Pengaruh Variabel Jumlah Restoran, Rumah Makan, dan Kafe terhadap TPT

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, variabel Jumlah Rumah Makan/Restoran/Kafe memiliki nilai koefisien regresi sebesar $9.693e^{-5}$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,822. Artinya, secara statistik, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara peningkatan jumlah rumah makan, restoran, dan kafe terhadap perubahan TPT di Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Nilai signifikansi yang jauh lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa meskipun arah koefisien positif, hubungan tersebut tidak cukup kuat untuk dikatakan bermakna secara statistik.

Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan usaha kuliner seperti rumah makan, restoran, dan kafe belum tentu berdampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja formal. Sebagian besar usaha di sektor ini berskala mikro dan kecil, dikelola oleh pemilik dan anggota keluarga tanpa merekrut pekerja tambahan. Hal ini diduga karena banyaknya restoran atau rumah makan di Jawa Barat yang tergolong usaha mikro dan kecil sehingga hanya menyerap sedikit tenaga kerja. Data BPS Jawa Barat tahun 2023 mencatat industri makanan sebanyak 288.318 unit dan industri minuman 17.042 unit, yang bersama-sama mencakup hampir 1/3 dari total 641.639 unit industri mikro dan kecil. Sementara itu, data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menunjukkan sebanyak 2.524.740 pelaku usaha kuliner makanan dan minuman masuk kategori UMKM. Ini menegaskan bahwa meskipun jumlahnya besar, sektor kuliner didominasi usaha kecil yang kontribusinya terhadap pengurangan pengangguran terbuka masih terbatas.

Lebih lanjut, sektor kuliner dalam konteks pariwisata sering kali bersifat musiman atau dipengaruhi oleh fluktuasi kunjungan wisatawan (Sukardi *et al.*, 2022). Ketika jumlah wisatawan meningkat, permintaan terhadap layanan kuliner memang naik, tetapi sifatnya sementara dan tidak cukup kuat untuk mendorong penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan. Pada saat kunjungan menurun, banyak usaha kuliner mengurangi jam operasional, mengandalkan tenaga kerja internal, atau bahkan berhenti sementara, sehingga tidak ada kebutuhan akan perekrutan tambahan. Secara teoritis, fenomena ini sejalan dengan *demand-driven employment theory*, yang menyatakan bahwa penciptaan

lapangan kerja sangat bergantung pada kestabilan dan kontinuitas permintaan pasar (Pratap *et al.*, 2021). Dalam sektor kuliner berbasis pariwisata, permintaan yang fluktuatif menyebabkan pola kerja yang tidak tetap dan menghambat terbentuknya struktur tenaga kerja formal yang stabil. Akibatnya, kebutuhan tenaga kerja yang bersifat tetap atau jangka panjang pun menjadi rendah.

Banyak pekerja di sektor ini juga terlibat dalam hubungan kerja informal, tanpa ikatan kerja formal, upah tetap, atau jaminan sosial tenaga kerja. Hubungan kerja informal seperti ini membuat kontribusi sektor kuliner sulit terdeteksi dalam indikator resmi seperti TPT, yang secara definisi lebih fokus pada pasar kerja formal. Secara teoritis, hal ini sesuai dengan *dual labor market theory* oleh Doeringer dan Piore tahun 1971 yang membedakan antara pasar kerja utama (formal) dan pasar kerja sekunder (informal), di mana sektor informal cenderung tidak memiliki stabilitas kerja, perlindungan hukum, atau prospek mobilitas yang jelas. Karena mayoritas usaha kuliner, terutama yang berskala mikro dan kecil, beroperasi dalam pasar kerja sekunder ini, maka pengaruhnya terhadap TPT menjadi tidak signifikan secara statistik. Selain itu, data dan survei ketenagakerjaan umumnya kurang mampu menangkap dinamika tenaga kerja informal secara menyeluruh, sehingga variabel ini terlihat lemah dalam menjelaskan variasi TPT secara empiris.

Pengaruh Variabel Jumlah Hotel Berbintang dan Non-bintang terhadap TPT

Hasil analisis terhadap variabel Jumlah Hotel menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar $-6.570e^{-5}$ dengan nilai signifikansi 0.982. Meskipun arah koefisien negatif secara teoritis dapat diartikan bahwa peningkatan jumlah hotel cenderung menurunkan tingkat pengangguran terbuka, namun nilai signifikansi yang sangat tinggi menunjukkan bahwa pengaruh ini tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, keberadaan hotel, baik hotel berbintang maupun nonbintang, tidak terbukti secara empiris memiliki pengaruh nyata terhadap pengurangan TPT di Jawa Barat tahun 2024.

Kondisi ini dapat dijelaskan melalui karakteristik sektor perhotelan yang secara umum dikategorikan sebagai sektor padat modal. Dalam teori ekonomi tenaga kerja, sektor padat modal atau *capital-intensive industry* ditandai dengan tingginya proporsi investasi modal dibandingkan dengan penggunaan tenaga kerja dalam proses produksinya sehingga pertumbuhan fisik atau jumlah unit usaha dalam sektor ini, seperti pembangunan hotel baru, tidak serta-merta disertai dengan peningkatan kebutuhan tenaga kerja yang besar (Mahendra & Utomo, 2023). Banyak hotel modern mengandalkan efisiensi operasional melalui teknologi otomasi, sistem layanan digital, dan manajemen terpusat, yang justru mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja langsung. Teori ini menegaskan bahwa dalam sektor-sektor padat modal, *output* ekonomi dapat meningkat tanpa perluasan besar dalam tenaga kerja, sehingga kontribusinya terhadap pengurangan pengangguran cenderung terbatas.

Di sisi lain, persebaran hotel di Provinsi Jawa Barat tidak merata. Kabupaten/kota yang memiliki kawasan wisata unggulan seperti Bandung, Bogor, atau Pangandaran cenderung memiliki konsentrasi hotel yang tinggi, sementara wilayah lainnya tidak memiliki permintaan pasar yang cukup untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. Ketimpangan spasial ini berdampak pada terbatasnya kontribusi sektor perhotelan terhadap penyerapan tenaga kerja di tingkat provinsi. Dalam konteks ini, pembangunan hotel cenderung bersifat lokal dan tidak tersebar luas, sehingga tidak mampu menyerap tenaga kerja secara merata di seluruh wilayah Jawa Barat. Selain itu, wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi belum tentu merupakan daerah yang mengalami perkembangan signifikan di sektor pariwisata atau perhotelan. Hal ini menyebabkan pertumbuhan jumlah hotel tidak mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan TPT secara agregat. Dengan demikian, meskipun sektor ini aktif di beberapa wilayah tertentu, dampak makronya terhadap pasar tenaga kerja provinsi tetap terbatas.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan antar kabupaten/kota di Jawa Barat dalam hal TPT dan indikator sektor pariwisata seperti jumlah kunjungan wisatawan, restoran, hotel, dan objek daya tarik wisata. Regresi linear berganda mengonfirmasi bahwa secara simultan variabel-variabel pariwisata berpengaruh signifikan terhadap TPT. Secara parsial, jumlah kunjungan wisatawan dan restoran/kafe memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap TPT, sedangkan jumlah hotel dan objek wisata menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan fasilitas pariwisata belum sepenuhnya disertai dengan integrasi ke pasar tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, kualitas dan pengelolaan pariwisata menjadi kunci agar sektor ini mampu menurunkan pengangguran secara merata dan berkelanjutan.

Untuk memaksimalkan peran pariwisata dalam menurunkan TPT, pemerintah perlu memperluas pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata. Pembangunan infrastruktur pariwisata harus dilakukan secara merata antar wilayah, disertai integrasi sektor UMKM dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lintas sektor seperti pendidikan dan upah, serta menggunakan pendekatan data panel agar dapat menangkap dinamika ketenagakerjaan secara lebih menyeluruh dari waktu ke waktu.

REFERENSI

- Anwar, K. (2023). Analisis Pengaruh Pendidikan dan Gini Rasio terhadap Tingkat Pengangguran di Kalimantan Selatan. *Jurnal Humaniora Dan Ilmu Pendidikan (Jahidik)*, 3(1), 9–18. <https://doi.org/10.35912/jahidik.v3i1.1993>
- BPS Provinsi Jawa Barat. (2025, February 28). *Provinsi Jawa Barat dalam angka 2025*. <https://jabar.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/d906b36c4b300ab77908dfe2/provinsi-jawa-barat-dalam-angka-2025.html>
- Lusiana, D., Qomar, M. B., & Setiadi, A. (2024). Potret Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Pengangguran Di Indonesia: Tinjauan Studi Literatur. *Liabilitas: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Akuntansi*, 9(2). <https://doi.org/10.54964/liabilitas/https>
- Mahendra, D. B., & Utomo, Y. P. (2023). *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 329–342
- Pratap, P., Dickson, A., Love, M., Zanoni, J., Donato, C., Flynn, M. A., & Schulte, P. A. (2021). Public health impacts of underemployment and unemployment in the United States: Exploring perceptions, gaps and opportunities. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(19). <https://doi.org/10.3390/ijerph181910021>
- Sukardi, A. A. R., Kusuma, H. E., & Riska, A. S. (2022). Hubungan antara pendapatan dan pola kunjungan pada kawasan wisata kuliner di Indonesia. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 11(1), 39–46. <https://doi.org/10.32315/jlbi.v11i1.71>
- Wati, I. M., Utami, A. F., & Nisa, F. L. (2024). Pengaruh Angkatan Kerja dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.